



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

**PANDANGAN UMUM;
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN KUNINGAN
TERHADAP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

- **YANG KAMI HORMATI PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUNINGAN.**
- **YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN.**
- **YANG KAMI HORMATI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.**
- **YANG KAMI HORMATI KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN.**
- **YANG KAMI HORMATI SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**
- **YANG KAMI HORMATI PARA ASISTEN PEMERINTAH DAERAH, STAF AHLI, KEPALA DINAS, BADAN, LEMBAGA DAN BAGIAN DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**
- **PARA CAMAT DAN HADIRIN TAMU UNDANGAN SERTA INSAN PERS YANG BERBAHAGIA.**

MULA PERTAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUNINGAN DALAM RANGKA MEMENUHI TUNTUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH LIMPAH KEPADA PANUTAN KITA SEMUA ROSULULLAH MUHAMMAD SAW, KEPADA PARA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA DAN KEPADA KITA SEMUA SEBAGAI UMAT YANG SELALU TAAT DALAM MELAKSANAKAN SYARIATNYA SERTA TETAP TEGAR DALAM MEMBELA RAKYAT.

SAUDARA BUPATI, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEBELUM MASUK KE DALAM MATERI POKOK PANDANGAN UMUM, IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN BAHWA SALAH SATU HAL YANG MENJADI PERHATIAN UTAMA FRAKSI KAMI SELAMA INI ADALAH BAHWASANYA PERAN SEMUA ELEMEN ATAUPUN STAKEHOLDER DI KABUPATEN KUNINGAN PERLU SENANTIASA DIGALANG AGAR UPAYA PEMULIHAN SEKALIGUS PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH MAUPUN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DAPAT BERJALAN SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN. MELALUI KOLABORASI DAN SINERGI ANTAR SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN, MAKA AKAN BANYAK HAL YANG DAPAT DILAKUKAN GUNA MENGATASI BERBAGAI PERSOALAN KABUPATEN KUNINGAN YANG TERJADI SAAT INI.

TUJUAN PEMBANGUNAN ADALAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAN DAN KEBAHAGIAAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI Keadilan dalam pendistribusian sumber daya alam dan kekayaan bersama, dalam konteks ini, Islam memiliki pendekatan yang lebih komprehensif terhadap konsep masyarakat sejahtera. Islam memandang manusia secara utuh meliputi aspek, fisik, psikologis dan spiritual. Oleh karena itu konsep masyarakat sejahtera adalah pemenuhan terhadap kebutuhan primer untuk menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin. Masyarakat sejahtera dalam skala paling minimal, menurut Islam dibingkai dalam lima kemaslahatan pokok (*AL-DHARÛRIYÂT AL-KHAMS*) yang harus terpenuhi, yakni keselamatan pokok agama (rukun iman dan rukus Islam), jiwa, akal yang sehat, keturunan yang baik dan jaminan keselamatan kepemilikan harta kekayaan. Kelima hal ini disebut dengan *AL-HÂJÂT AL-DHARÛRIYÂT* (kebutuhan primer). Dengan demikian pembangunan sektor kebutuhan dasar untuk menjamin keselamatan lima hal pokok bagi kemaslahatan manusia tersebut harus menjadi prioritas utama, yang juga mengharuskan pendistribusian dan alokasi sumber dana atau anggaran pembangunan secara proporsional dan memadai untuk produksi kebutuhan dasar dimaksud.

MENURUT ISLAM, MASALAH DISTRIBUSI SEBAGAI PROBLEMA UTAMA EKONOMI MENURUT EKONOMI ISLAM, PENANGGULANGANNYA DILAKUKAN SECARA LANGSUNG PADA SASARAN, MELALUI PEMENUHAN HAK DASAR KEBUTUHAN EKONOMI, DENGAN MEMPERIORITASKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PRODUKSI KEBUTUHAN DASAR

TERSEBUT, MENGACU PADA TUJUAN UTAMA DARI *MAQÂŞID AL-SYARÍ'AH*, YAKNI *AL DHARÚRIYÂT AL-KHAMS*, SEBELUM PENYEDIAAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PADA SKALA PELENGKAP DAN *TAHSÍNIYAH*.

SELANJUTNYA, SEBAGAIMANA KITA PAHAM BERSAMA, BAHWA APBD MERUPAKAN DOKUMEN PUBLIK YANG MENJADI SALAH SATU INSTRUMEN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH AGAR BERJALAN SECARA LEBIH EFEKTIF DAN AKUNTABEL. HAL INI BISA DIPAHAMI KARENA DALAM DOKUMEN APBD TERDAPAT PERENCANAAN MENYANGKUT PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, SERTA PEMBIAYAAN DAERAH YANG DIASUMSIKAN SECARA TERUKUR SELAMA 1 (SATU) TAHUN. ATAS DASAR BERBAGAI PERTIMBANGAN TERSEBUT SERTA MELIHAT PERKEMBANGAN TERAKHIR SAAT INI BAIK TERKAIT KONDISI MAKRO EKONOMI DAERAH BERIKUT KETIDAKPASTIANNYA KE DEPAN, MAKA KAMI MENDORONG SAUDARA BUPATI BESERTA SELURUH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN UNTUK DAPAT LEBIH MENOPTIMALKAN LAGI APBD TAHUN INI MAUPUN TAHUN-TAHUN MENDATANG, TERUTAMA DALAM HAL PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

SEBELUM MENANGGAPI MATERI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN PEMERINTAH DAERAH BEBERAPA WAKTU YANG LALU, IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN BAHWA BERDASARKAN HASIL PENELAAHAN YANG KAMI LAKUKAN ATAS BERAGAM KONDISI, REALISASI, SERTA CAPAIAN DARI PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DARI TAHUN KE TAHUN, IJINKAN KIRANYA KAMI SAMPAIKAN TERLEBIH DAHULU BEBERAPA CATATAN, TELAAHAN, KEGUNDAHAN, SERTA BEBERAPA PANDANGAN KAMI BERIKUT INI :

1. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BHAYANGKARA KE-80 TAHUN YANG JATUH PADA TANGGAL 1 JULI 2026, DELAPAN DEKADE BUKAN SEKEDAR ANGKA, SEJAK LAHIRNYA BHAYANGKARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TELAH BERJALAN BERIRINGAN BERSAMA BANGSA, MELEWATI BERBAGAI BADAI SEJARAH DEMI SATU TUJUAN MULIA **"MELINDUNGI, MENGAYOMI, DAN MELAYANI MASYARAKAT"**.

TERIMA KASIH ATAS 80 TAHUN PENGABDIAN YANG TAK PERNAH PADAM. SEMOGA POLRI TERUS PRESISI, SEMAKIN DICINTAI, DAN SELALU MENJADI GARDA TERDEPAN DALAM MENJAGA KEDAMAIAN SERTA KETENTERAMAN IBU PERTIWI. 80 TAHUN POLRI MENGABDI UNTUK MASYARAKAT, MENUJU INDONESIA EMAS.

2. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN MENERIMA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN ANGGARAN 2025 DARI BPK-RI. KAMI SAMPAIKAN APRESIASI SETINGGI-TINGGINYA AKAN HAL INI. NAMUN DEMIKIAN BERULANG KALI KAMI TELAH MENINGATKAN, BAHWA BAHKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) DARI BPK-RI, TIDAK MENJADI JAMINAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SELAMA INI TELAH SEPENUHNYA (100%) PATUH TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA BEBAS DARI KECURANGAN DAN KETIDAKPATUTAN YANG BERPENGARUH LANGSUNG TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. MASIH BANYAK TENTUNYA HAL YANG PERLU DIKAJI, DIKRITISI, DIPERBAIKI DAN DIBENAIH DARI BERBAGAI SISI DAN SUDUT PANDANG. MISALNYA DARI SISI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI, SKALA PRIORITAS, INTEGRITAS, DAN LAIN SEBAGAINYA.

3. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWASANYA ISU, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN SAAT INI ANTARA LAIN MENGACU PADA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026, SERTA RPJPD TAHUN 2005-2025. HAL INI TENTU MENJADI CATATAN TERSENDIRI BAGI KITA SEMUA. SELEPAS HAJAT DEMOKRASI BEBERAPA WAKTU LALU, SEKALIGUS TERPILIHNYA KEPALA DAERAH YANG BARU HASIL PILIHAN MASYARAKAT, TENTU DIHARAPKAN MEMBAWA PERUBAHAN SEKALIGUS VISI MISI BARU YANG LEBIH TEPAT DAN DIBUTUHKAN BAGI SUKSESNYA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENUJU KABUPATEN KUNINGAN YANG LEBIH BAIK LAGI KE DEPANNYA. HARAPAN SEKALIGUS PERTANYAAN YANG TENTU SAJA TIDAKLAH BERLEBIHAN, SEKALIGUS JUGA TIDAK BISA DIABAIKAN.
4. SEMENTARA ITU DI LAPANGAN, KAMI MENCATAT BEBERAPA PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KABUPATEN KUNINGAN SAAT INI JUGA YANG PERLU SEGERA MENDAPAT PERHATIAN YANG LEBIH SERIUS DAN MENJADI PRIORITAS, ANTARA LAIN TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN DAN ANGKA PENGANGGURAN, MASIH RENDAHNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SEBAGIAN WILAYAH YANG DINYATAKAN RAWAN BENCANA, MASIH TERDAPATNYA KASUS BALITA GIZI BURUK DAN KASUS *STUNTING*, SERTA BELUM OPTIMALNYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM). SEKEDAR SALING MENINGATKAN, SALAH SATU TUGAS UTAMA PEMERINTAH DAERAH ADALAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DITUNJUKKAN MELALUI CAPAIAN KINERJANYA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. FAKTANYA, ANGKA KEMISKINAN, PENGANGGURAN TERBUKA, DAN KESENJANGAN PENDAPATAN JUSTRU MASIH MENJADI PERSOALAN SERIUS YANG HARUS DIHADAPI OLEH PEMKAB KUNINGAN DARI TAHUN KE TAHUN. HAL INI TENTU MENJADI HAL YANG HARUS SENANTIASA KITA RENUNGAN BERSAMA.

5. PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH KABUPATEN KUNINGAN SEJAUH INI KAMI PANDANG BELUM TERWUJUD SECARA OPTIMAL SEBAGAIMANA DIAMANKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, TERUTAMA DI SEKTOR EKONOMI DAN PARIWISATA. SELAIN DISEBABKAN ADANYA PERMASALAHAN TEKANAN EKONOMI GLOBAL DAN DAMPAK PANDEMI SEJAK BEBERAPA TAHUN LALU, JUGA DIPERBURUK OLEH ADANYA KETERBATASAN KAPASITAS SDM DAN SIKAP MENTAL YANG KADANG HANYA TERBATAS PADA PEMENUHAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEMATA.
6. SECARA KESELURUHAN, FRAKSI KAMI SENANTIASA BERHARAP ADANYA RELEVANSI YANG KUAT DARI APBD SELAMA INI TERMASUK APBD TAHUN 2025 LALU DENGAN SITUASI KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN, SEBAGAI SOLUSI ATAS PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI BERBAGAI BIDANG. DALAM RANCANGAN APBD KE DEPANNYA, JELAS DIPERLUKAN ADANYA REORIENTASI ULANG KEBIJAKAN PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN. DALAM HAL INI, KAMI INGIN MENINGATKAN MENGENAI PENTINGNYA MENCERMATI BERBAGAI INDIKATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, TERMASUK DI DALAMNYA MENYANGKUT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SELURUH ANGGOTA DEWAN LEGISLATIF UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.
7. SEMENTARA ITU DALAM LINGKUP ISU BIDANG LINGKUNGAN, KABUPATEN KUNINGAN KITA TERCINTA INI YANG DIGADANG-GADANG SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI, BAHKAN DISEBUT-SEBUT SEBAGAI SALAH SATU HARAPAN BESAR DI TENGAH KRISIS, TERNYATA MASIH BELUM LUPUT DARI BERBAGAI TANTANGAN DAN PERSOALAN. BEBERAPA PERSOALAN YANG MENCUAT BELAKANGAN INI ANTARA LAIN TERKAIT POLUSI PLASTIK, PENGELOLAAN SAMPAH YANG BELUM OPTIMAL, PENCEMARAN LIMBAH DAN KOTORAN HEWAN (KOHE), BAHKAN EROSI DAN LONGSOR DI BEBERAPA TEMPAT. TERLEPAS DARI SIAPA YANG SALAH DAN SIAPA YANG BENAR, LAGI-LAGI SEMUANYA AKAN MENJADI AJANG PEMBUKTIAN, DI SISI MANA PEMERINTAH DAERAH AKAN BERDIRI DAN SEPERTI APA CARA MENGAMBIL TINDAKAN.
8. DI SEKTOR EKONOMI, KONDISI MEMPRIHATINKAN TERLIHAT DARI KONDISI KRITIS DI MANA BANYAK ORANG YANG KESUSAHAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP. HAL TERSEBUT DIPERBURUK LAGI DENGAN INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI HAMPIR SELURUH PELOSOK KABUPATEN, KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI YANG SEMAKIN JOMPLANG, DITAMBAH LAGI DENGAN ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA YANG TERUS MERANGKAK NAIK SEMENTARA LOWONGAN PEKERJAAN TERBATAS DAN SULITNYA PELUANG BERUSAHA. TIDAK SEDIKIT DITEMUKAN KONDISI PASAR TRADISIONAL YANG SEPI PEMBELI, BANYAK PEDAGANG MENANGIS KARENA PENJUALAN MENURUN

DRASTIS, AKIBAT DARI DAYA BELI MASYARAKAT KUNINGAN YANG SEMAKIN MENIPIS.

9. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MEMANDANG, BAHWA PERENCANAAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG TIDAK TERUKUR, YANG KEMUDIAN DIBARENGI DENGAN REALISASI BELANJA DAERAH YANG DILAKSANAKAN TANPA MEMPERHATIKAN KETERSEDIAAN DANA, DIPERBURUK LAGI DENGAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA, ADALAH INTI DARI PERMASALAHAN BESAR PENGELOLAAN KEUANGAN APBD KABUPATEN KUNINGAN SEJAK TAHUN 2022 LALU, YANG TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN MASIH AKAN TERUS TERULANG DAN MENJADI BEBAN APBD HINGGA BEBERAPA TAHUN KE DEPAN. KONDISI DEMIKIAN SEDIANYA AKAN MEMUNCULKAN SEBUAH PERTANYAAN, AKANKAH VISI MISI YANG DIJANJIKAN SAUDARA BUPATI BISA BENAR-BENAR DIREALISASIKAN, SEKALIGUS MAMPU MENJAWAB BERBAGAI TANTANGAN DAN PERSOALAN DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN?

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI BANGGAKAN.

SEBAGAIMANA KITA PAHAMI BERSAMA, BAHWA APBD MERUPAKAN DOKUMEN PUBLIK YANG MENJADI SALAH SATU INSTRUMEN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH AGAR BERJALAN SECARA LEBIH EFEKTIF DAN AKUNTABEL. BERKENAAN DENGAN HAL TERSEBUT, SEKALIGUS MENCERMATI MATERI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 LALU, BERIKUT KIRANYA KAMI SAMPAIKAN BERBAGAI PANDANGAN UMUM KAMI, ANTARA LAIN:

A. PENDAPATAN DAERAH

1. DARI SISI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, KAMI MASIH MENEMUKAN FAKTA YANG MENUNJUKKAN BAHWA HINGGA LKPD KABUPATEN KUNINGAN DISERAHKAN KEPADA BPK SEBELUM DIAUDIT, TERCATAT ADA SAJA SKPD YANG BELUM MENGUMPULKAN DRAFT LAPORAN KEUANGAN SKPD. FAKTA YANG SUNGGUH MEMPRIHATINKAN DAN KAMI HARAPKAN TIDAK TERULANG DARI TAHUN KE TAHUN. SELAIN ITU, FRAKSI KAMI MASIH MERASA PERLU MENYOROTI PROSES AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BEBERAPA KALI MENURUT BPK-RI BELUM SEPENUHNYA MELAKUKAN PENCATATAN ATAS TRANSAKSI KEUANGAN SECARA AKRUAL. SINGKATNYA, PENYAJIAN LKPD SELAMA INI MEMILIKI RESIKO SALAH SAJI YANG

TINGGI ATAS KELENGKAPAN DATA SEHINGGA MEMERLUKAN REVIU YANG MEMADAI.

UNTUK ITU, MOHON PENJELASAN TERKAIT KEDUA HAL TERSEBUT DI DALAM PROSES PENYUSUNAN LPJ APBD TAHUN ANGGARAN 2025 INI.

2. SELANJUTNYA, SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN DALAM DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 BEBERAPA WAKTU YANG LALU, PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025 SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR RP 2,825 TRILYUN ATAU LEBIH RENDAH DARI RENCANA DI TAHUN 2024 YAKNI SEBESAR RP 3,154 TRILYUN, BAHKAN LEBIH RENDAH JIKA DIBANDINGKAN TARGET DI TAHUN 2023 SEBESAR RP 3,081 TRILYUN, ATAU TAHUN 2022 SEBESAR RP 2,978 TRILYUN. SEMENTARA DALAM REALISASINYA, PENDAPATAN DAERAH MENCAPAI 93,50% DARI TARGET YAITU SEBESAR RP 2,641 TRILYUN. BERDASARKAN CATATAN KAMI, REALISASI INI LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN CAPAIAN DI TAHUN 2024 SEBESAR 90,60% MAUPUN TAHUN 2023 SEBESAR 92%.

SECARA UMUM TERKAIT PENDAPATAN DAERAH INI, MOHON DIPAPARKAN PERIHAL PERSOALAN DAN KENDALA TERBESAR APA SAJA YANG DIHADAPI DALAM MEREALISASIKAN TARGET PENDAPATAN DAERAH SEPANJANG TAHUN 2025 LALU.

3. SEMULA, FRAKSI KAMI SUNGGUH OPTIMIS BAHWA TARGET PENDAPATAN DAERAH DI TAHUN 2024 LALU SALAH SATU KONTRIBUSI PERUBAHANNYA DIHARAPKAN BERASAL DARI PENINGKATAN TARGET PAD, TIDAK MELULU MENGANDALKAN PENINGKATAN DARI PENDAPATAN TRANSFER. KENAIKAN PAD TAHUN 2024 LALU JUGA DIHARAPKAN DIPICU OLEH MENINGKATNYA TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH, MENINGKATNYA HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DAN KENAIKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH. NAMUN APALAH DAYA, REALISASINYA TERNYATA MASIH BELUM SESUAI DARI YANG DIHARAPKAN. NAMUN DEMIKIAN TERLEPAS DARI REALISASI PENDAPATAN DAERAH KHUSUSNYA PAD YANG MENGECEWAKAN, DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN PUBLIK, JENIS PELAYANAN APA SAJA YANG SECARA SIGNIFIKAN BERHASIL DITINGKATKAN DI TAHUN 2025 LALU? MOHON PEMAPARANNYA.

4. DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH HENDAKNYA SECARA KETAT MENEKAN TINGKAT KEBOCORAN DALAM MATA RANTAI PEMUNGUTAN. DI SAMPING ITU, SECARA PERIODIK MELAKUKAN DIAGNOSA YANG KOMPREHENSIF TERHADAP KONDISI KESEHATAN BUMD, AGAR BISA MENDONGKRAK KINERJANYA. DENGAN DEMIKIAN PADA AKHIRNYA

PULA, ADA TARGET YANG TERUKUR SECARA KUANTITATIF SEBAGAI BAGIAN DARI INDIKATOR KINERJA.

MOHON PEMAPARANNYA BERKENAAN DENGAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG TELAH DIAMBIL DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DI TAHUN 2025 LALU.

5. DARI SISI PERENCANAAN, PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM APBD TAHUN 2025 DITARGETKAN SEBESAR RP 479,05 MILYAR, YANG TERDIRI DARI PAJAK DAERAH SEBESAR RP 235,35 MILYAR DAN RETRIBUSI DAERAH SEBESAR RP 214,17 MILYAR. DENGAN DEMIKIAN, TARGET PAD TERSEBUT LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PAD TAHUN 2024 SEBESAR RP 386,37 MILYAR, NAMUN LEBIH RENDAH DARI TARGET DI TAHUN 2023 SEBESAR RP 522,2 MILYAR, MAUPUN TARGET DI TAHUN 2022 SEBESAR RP 551,99 MILYAR. BERDASARKAN CATATAN KAMI, MESKIPUN TARGET PEROLEHAN PAJAK DAERAH RELATIF OPTIMIS DAN STABIL DARI TAHUN KE TAHUN, NAMUN TERDAPAT GAP YANG CUKUP BESAR ANTARA RENCANA DAN REALISASI, KHUSUSNYA PADA SEKTOR RETRIBUSI DAERAH. PADAHAL SEJATINYA, RETRIBUSI DAERAH YANG NOTABENE TERKAIT SECARA LANGSUNG DENGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAYANI MASYARAKAT INI SEHARUSNYA BISA TERUS DI TINGKATKAN DARI TAHUN KE TAHUN, KARENA MENJADI SALAH SATU TULANG PUNGGUNG KEMANDIRIAN DAERAH. MOHON TANGGAPANNYA DALAM HAL INI.

6. DARI SISI REALISASI, TERCATAT BAHWA TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SEBELUMNYA DIANGGARKAN SEBESAR RP 479,05 MILYAR TERNYATA HANYA BISA TEREALISASI SEBESAR RP 379,88 MILYAR ATAU 79,30% SAJA. DENGAN KATA LAIN, MESKIPUN NOMINALNYA LEBIH BESAR DIBANDING TAHUN 2024 SEBESAR RP 313,33 MILYAR, NAMUN PROSENTASE CAPAIANNYA JUSTRU LEBIH RENDAH DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA YAITU SEBESAR 81,10%. TERKAIT HAL INI, FRAKSI KAMI MEMINTA PIHAK-PIHAK TERKAIT UNTUK MEMBERI PENJELASAN YANG SEJUJUR-JUJURNYA SERTA TRANSPARAN PERIHAL RENDAHNYA PROSENTASE CAPAIAN PENERIMAAN PAD KHUSUSNYA SELAMA 2-3 TAHUN TERAKHIR INI, TERMASUK CAPAIAN DI TAHUN 2025 LALU, BAGAIMANA HAL TERSEBUT BISA TERJADI BERULANG KALI, SERTA ASUMSI-ASUMSI APA SAJA BERIKUT RUMUSAN ATAU FORMULA YANG DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SELAMA INI?
MOHON PENJELASANNYA.

7. KONDISI YANG TIDAK MENGGEMBIRAKAN MENURUT HEMAT KAMI ADALAH PADA PROSENTASE CAPAIAN RETRIBUSI DAERAH YANG HANYA MENCAPAI SEBESAR RP 145,13 MILYAR ATAU HANYA 67,76%. MESKI PROSENTASE CAPAIANNYA LEBIH TINGGI DARI TAHUN 2024 SEBESAR 63,97% ATAU TAHUN

2023 SEBESAR 35,5%, NAMUN MASIH LEBIH RENDAH DIBANDING CAPAIAN DI TAHUN 2021 SEBESAR 85,74% ATAU TAHUN 2020 SEBESAR 90,37%. SEKEDAR CATATAN SAJA, RETRIBUSI DAERAH DI TAHUN 2014 PERNAH MENCAPAI HINGGA 117%. HAL INI TENTU PATUT MENJADI BAHAN RENUNGAN DAN PERTANYAAN BERSAMA TERKAIT APA YANG TERJADI DENGAN RETRIBUSI DAERAH SEPANJANG BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI, TERMASUK DI TAHUN 2025 LALU.

MOHON TANGGAPAN DAN PENJELASANNYA DALAM HAL INI.

8. SELANJUTNYA, KAMI MEMBERIKAN APRESIASI ATAS CAPAIAN 2 (DUA) JENIS RETRIBUSI YANG CAPAIANNYA DI ATAS 100% DI TAHUN 2025 LALU. KEDUA JENIS RETRIBUSI TERSEBUT ADALAH RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN YANG MENCAPAI 101,05% DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) SEBESAR 119,13%. DI SISI LAIN, KAMI SUNGGUH MENYAYANGKAN AKAN RENDAHNYA CAPAIAN DARI BEBERAPA KOMPONEN RETRIBUSI SEPERTI RETRIBUSI JASA USAHA SEBESAR 13,83%, RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SEBESAR 24,26%, RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBESAR 9,89%, SERTA RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG SEBESAR 22,76%.

MOHON KIRANYA PENJELASAN ATAS RENDAHNYA CAPAIAN KEEMPAT KOMPONEN RETRIBUSI DIMAKSUD.

9. TERKAIT REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH, KEMBALI TERCATAT ADANYA PENCAPAIAN TERENDAH YAKNI DARI PENDAPATAN JASA GIRO YANG REALISASINYA HANYA MENCAPAI 50,43% SERTA PENERIMAAN DARI TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAERAH SEBESAR 4,71%. BERDASARKAN CATATAN KAMI, KEDUANYA JUGA TERCATAT SEBAGAI KOMPONEN DENGAN CAPAIAN TERENDAH DI TAHUN 2024 LALU.

DALAM HAL INI, MOHON KIRANYA PENJELASAN YANG MEMADAI TERKAIT RENDAHNYA CAPAIAN DARI KEDUA JENIS RETRIBUSI TERSEBUT.

10. PENCAPAIAN YANG CUKUP MENGGEMBIRAKAN DATANG DARI PENDAPATAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN YANG MENCAPAI 100% DARI TARGET YAITU TOTAL SEBESAR RP 6,67 MILYAR YANG BERASAL DARI BANK KUNINGAN SEBESAR RP 1,47 MILYAR, PAM TIRTA KAMUNING SEBESAR RP 2,58 MILYAR, SERTA BANK JABAR SEBESAR RP 2,61 MILYAR. BERDASARKAN CATATAN KAMI, REALISASI TERSEBUT SAMA PERSIS DENGAN TAHUN 2024 YAITU SEBESAR 100%, DAN LEBIH BAIK DIBANDING TAHUN 2023 LALU SEBESAR 90,6%, NAMUN LEBIH RENDAH JIKA DIBANDINGKAN TAHUN 2022 YANG REALISASINYA MENCAPAI 112,18% DARI TARGET. SECARA TULUS, KAMI SAMPAIKAN APRESIASI AKAN HAL INI.

11. DARI TOTAL REALISASI PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR RP 2,21 TRILYUN DI TAHUN 2025 LALU, ATAU LEBIH RENDAH DIBANDING TAHUN 2024 SEBESAR RP 2,49 TRILYUN, TERCATAT BAHWA PENDAPATAN DAERAH YANG BERASAL DARI TRANSFER PEMERINTAH PUSAT BERUPA DANA PERIMBANGAN TAHUN 2025 LALU MENCATATKAN REALISASI SEBESAR RP 2,10 TRILYUN ATAU 97,18% DARI TARGET SEMULA SEBESAR RP 2,29 TRILYUN. 2024 LALU MENCATATKAN REALISASI SEBESAR RP 2,23 TRILYUN ATAU 91,02% DARI TARGET SEMULA SEBESAR RP 2,45 TRILYUN. DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN CATATAN KAMI, PROSENTASE CAPAIANNYA LEBIH TINGGI DIBANDING TAHUN 2024 SEBESAR 91,02% NAMUN LEBIH RENDAH DIBANDING TAHUN 2023 SEBESAR 97,4%, BAHKAN TAHUN 2021 YANG MENCAPAI 100,19%.
- MOHON KIRANYA DIBERIKAN PENJELASAN MENGENAI PENYEBAB RELATIF MENURUNNYA PROSENTASE CAPAIAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT BERUPA DANA BAGI HASIL DARI PUSAT YANG CAPAIANNYA HANYA 84,08% SERTA BAGI HASIL PAJAK SEBESAR 82,89%.
12. TERAKHIR TERKAIT PENDAPATAN DAERAH, SECARA UMUM FAKTA MENUNJUKKAN BAHWA PENETAPAN TARGET PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI TIDAKLAH BERDASARKAN HASIL IDENTIFIKASI POTENSI PAD YANG TERUKUR DAN REALISTIS. DI SISI LAIN, TINGGINYA PENETAPAN TARGET PAD TERSEBUT DIKUTI DENGAN PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG LEBIH BESAR. KEBIJAKAN TERSEBUT MENIMBULKAN DAMPAK DEFISIT RIIL APBD YANG MELEBIHI AMBANG BATAS HINGGA MENGAKIBATKAN TUNGGAKAN UTANG BELANJA, DITAMBAH LAGI ADANYA PENGGUNAAN KAS YANG PENGGUNAANNYA TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA. BERBAGAI HAL TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA LIKUIDITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DI TAHUN 2023 MAUPUN TAHUN 2024 LALU TIDAKLAH SEHAT.
- TERKAIT HAL INI, KAMI MEMINTA AGAR PIHAK-PIHAK TERKAIT BISA MEMBERIKAN PENJELASAN YANG MEMADAI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN SEKALIGUS MEMBERIKAN GAMBARAN YANG LEBIH RINCI TERKAIT PERKEMBANGAN UPAYA DALAM MENGATASINYA.

SAUDARA BUPATI, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

B. BELANJA DAERAH

1. SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN BELANJA DAERAH, SECARA UMUM KITA TENTU SEPAKAT BAHWASAN BELANJA DAERAH SEYOGYANYA DIUPAYAKAN AGAR SENANTIASA SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH YANG DIARAHKAN PADA PEMBELANJAAN YANG PROPORSIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MENSEJAHTERAKAN PUBLIK. NAMUN DALAM FAKTANYA, KAMI

MENILAI BAHWA STRUKTUR APBD KUNINGAN DARI TAHUN KE TAHUN MENUNJUKKAN BAHWA PORSI TOTAL BELANJA MODAL JAUH LEBIH KECIL DIBANDING PORSI BELANJA OPERASI. MENURUT CATATAN KAMI, BELANJA MODAL SELAMA INI HANYA DI KISARAN 10,45% SAJA, LEBIH RENDAH DIBANDING RATA-RATA SE-JABAR SEBESAR 12,07%. SEMENTARA BELANJA OPERASI DI KISARAN 72,10% ATAU LEBIH TINGGI DARI RATA-RATA SE-JABAR SEBESAR 70,45%. HAL INI SEMATA MENGGAMBARAKAN BETAPA RENDAHNYA ALOKASI ANGGARAN DAN EFEKTIFITASNYA UNTUK MENSEJAHTERAKAN PUBLIK SEKALIGUS JUGA TERKESAN BOROS.

MOHON KIRANYA TANGGAPAN SEKALIGUS PENJELASANNYA TERKAIT HAL INI.

2. SELANJUTNYA, TERCATAT BAHWA BELANJA DAERAH DI TAHUN 2025 LALU TEREALISASI SEBESAR 2,69 TRILYUN ATAU 92,37% DARI TARGET YANG SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR 2,92 TRILYUN. SECARA NOMINAL, JELAS TERLIHAT LEBIH RENDAH DIBANDING TAHUN 2024 YANG TEREALISASI SEBESAR RP 2,87 TRILYUN, TAHUN 2023 SEBESAR RP 2,83 TRILYUN, ATAU TAHUN 2022 SEBESAR RP 2,70 TRILYUN. ADAPUN RINCIANNYA ADALAH BELANJA OPERASI YANG TEREALISASI SEBESAR RP 2,02 TRILYUN ATAU 90,44% DARI TARGET, DAN BELANJA MODAL SEBESAR RP 172,32 MILYAR ATAU 95,00% DARI TARGET.

MOHON PENJELASANNYA, TINDAKAN NYATA APA SAJA YANG TELAH DILAKUKAN YANG DIARAHKAN GUNA MENAMBAH PELUANG ALOKASI BELANJA MODAL SEKALIGUS UPAYA GUNA MENEKAN BELANJA OPERASI KHUSUSNYA PADA BELANJA PEGAWAI SEPANJANG TAHUN 2025 LALU.

3. DARI SEGI POSTUR ANGGARAN, BELANJA DAERAH DI TAHUN 2025 LALU PORSI TERBESARNYA MASIH SAJA PADA BELANJA OPERASI KHUSUSNYA PADA BELANJA PEGAWAI YAKNI SEBESAR RP 1,31 TRILYUN. BERDASARKAN CATATAN KAMI, BELANJA PEGAWAI DI TAHUN 2024 MENCAPAI ANGKA SEBESAR RP 1,34 TRILYUN, SEDANGKAN TAHUN 2023 MENCAPAI ANGKA SEBESAR RP 1,23 TRILYUN. SEMENTARA ITU, SELAIN PROPORSI NOMINALNYA YANG RELATIF KECIL, PROSENTASE CAPAIAN DARI SELURUH KOMPONEN BELANJA MODAL HANYALAH SEBESAR 95,00%. KECILNYA NOMINAL MAUPUN PROSENTASE CAPAIAN DARI BELANJA MODAL INI TENTU PERLU MENJADI BAHAN RENUNGAN, APAKAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN KABUPATEN KUNINGAN SELAMA INI SUDAH SEPENUHNYA BERORIENTASI PADA KEBIJAKAN ANGGARAN LANGSUNG UNTUK PUBLIK, JUGA BELUM BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN.

MOHON TANGGAPAN DALAM HAL INI.

4. BERKENAAN DENGAN PENTINGNYA PERHITUNGAN BELANJA UNTUK *MANDATORY SPENDING* DALAM APBD, PENYERAPAN ANGGARAN YANG

KURANG MEMPERHATIKAN KETERSEDIAAN DANA DAN PRIORITAS KEBUTUHAN AKAN BERDAMPAK PADA APBD, KARENA TIDAK MEMPERHATIKAN *VALUE FOR MONEY* DARI SETIAP DANA YANG DIGUNAKAN SEBAGAIMANA AMANAT UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN MAUPUN PP NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. SELAIN MENYEBABKAN POTENSI TIDAK TERSEDIA DANA UNTUK MEMBAYAR UTANG BELANJA MISALNYA, JUGA BISA MENGGANGGU KESINAMBUNGAN FISKAL JANGKA PANJANG PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DAN TERGANGGUNYA KEWAJARAN KAS DAERAH, SERTA ADANYA POTENSI SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM. DAMPAK TERPENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN ADALAH TIDAK TERCAPAINYA *MANDATORY SPENDING* PADA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK YANG MENJADI HAK MASYARAKAT. ATAS KONDISI TERSEBUT, FRAKSI KAMI MEMINTA PENJELASAN KHUSUSNYA DARI PIHAK TAPD TERKAIT PERIHAL KONDISI TERSEBUT, SEKALIGUS *PROGRESS* DARI LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENYIKAPINYA, KHUSUSNYA DI SEPANJANG TAHUN 2025 LALU.

5. BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 LALU TEREALISASI SEBESAR RP 1,31 TRILYUN ATAU 94,92% DARI RENCANA SEBESAR RP 1,37 TRILYUN. HAL INI MENINGKAT DIBANDING REALISASI DI TAHUN 2024 SEBESAR RP 1,25 TRILYUN ATAU DI TAHUN 2023 LALU SEBESAR RP 1,23 TRILYUN. BELANJA PEGAWAI TERSEBUT ANTARA LAIN DIREALISASIKAN UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BAIK ASN MAUPUN NON ASN. KAMI BERHARAP AGAR SELURUH PENGGUNA ANGGARAN SENANTIASA MEMPEDOMANI PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM MENGUSULKAN DAN MENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA). KAMI BERHARAP, AGAR TIDAK LAGI TERJADI KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEPERTI BEBERAPA WAKTU LALU.

MOHON TANGGAPAN SAUDARA BUPATI.

6. BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 TERCATAT SEBESAR RP 647,05 MILYAR ATAU 82,73% DARI RENCANA SEMULA SEBESAR RP 782,16 MILYAR, 2024 TERCATAT SEBESAR RP 664,16 MILYAR ATAU 78,99% DARI RENCANA SEMULA SEBESAR RP 840,83 MILYAR. BAIK SECARA NOMINAL MAUPUN PROSENTASE CAPAIAN, ANGKA INI TERCATAT JAUH LEBIH RENDAH DARI REALISASI TAHUN DI TAHUN 2024 YANG TERCATAT SEBESAR 664,16 MILYAR ATAU 78,99% MAUPUN TAHUN 2023 SEBESAR RP 740,03 MILYAR ATAU 86,9%, BAHKAN MASIH JAUH LEBIH RENDAH DIBANDING TAHUN 2022 SEBESAR RP 787,35 MILYAR ATAU 88,03%.

SEKALI LAGI KAMI INGIN MENINGATKAN AGAR DALAM PELAKSANAANNYA, BELANJA BARANG DAN JASA INI HARUS SENANTIASA SESUAI KETENTUAN,

YAITU PERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SERTA KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN KUNINGAN. JANGAN SAMPAI ADA TAPD YANG KURANG CERMAT DALAM MEMVERIFIKASI KESESUAIAN KOMPONEN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM, MISALNYA. MOHON AGAR DIBERIKAN RINCIAN DAN PENJELASAN TERKAIT BESARAN DAN JENIS ALOKASI BELANJA JASA DI TAHUN 2025 LALU.

7. PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN PADA TAHUN 2025 LALU MENGANGGARKAN BELANJA HIBAH SEBESAR RP 64,98 MILYAR DENGAN REALISASI SEBESAR RP 57,84 MILYAR ATAU 89,01%. PADA TAHUN 2024 LALU MENGANGGARKAN BELANJA HIBAH SEBESAR RP 115,66 MILYAR DENGAN REALISASI SEBESAR RP 102,20 MILYAR ATAU 92,58%. BERDASARKAN CATATAN KAMI, ANGKA INI JELAS LEBIH RENDAH DIBANDING TAHUN 2024 SEBESAR 102,20 MILYAR, TAHUN 2023 SEBESAR RP 88,06 MILYAR, ATAUPUN TAHUN 2022 SEBESAR RP 66,57 MILYAR.

MOHON KIRANYA DIBERIKAN PENJELASAN MENGENAI SEMAKIN BERKURANGNYA ALOKASI DANA HIBAH INI DARI TAHUN KE TAHUN.

8. KHUSUS UNTUK PENGELOLAAN BLT DBHCHT, KAMI BERHARAP PELAKSANAANNYA SENANTIASA MENGACU PADA PMK NOMOR 215/PMK.07/2021 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DBHCHT, PERMENDAGRI NOMOR 77 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SERTA PERBUP KUNINGAN NOMOR 247 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN KUNINGAN.

MOHON KIRANYA DIBERIKAN RINCIAN TERKAIT BESARAN DAN JENIS ALOKASI BELANJA HIBAH DI TAHUN 2025 LALU.

9. PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN PADA TAHUN 2024 LALU MEREALISASIKAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN SEBESAR RP 53,87 MILYAR ATAU 91,00% DARI TARGET SEBESAR 59,20 MILYAR. BERDASARKAN CATATAN KAMI, REALISASI BELANJA YANG SAMA DI TAHUN 2024 TERCATAT SEBESAR RP 179,12 MILYAR, SEDANGKAN REALISASI DI TAHUN 2023 ADALAH SEBESAR RP 67,44 MILYAR. DENGAN DEMIKIAN, NOMINALNYA TERCATAT SEMAKIN BERKURANG DARI TAHUN KE TAHUN. DALAM PELAKSANAANNYA, KAMI BERHARAP AGAR MENGACU PADA PERATURAN YANG BERLAKU, MISALNYA PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONA, SEHINGGA TIDAK PERLU SAMPAI TERJADI ADANYA PEMBOROSAN KEUANGAN DAERAH.

DALAM HAL INI, MOHON KIRANYA DIBERIKAN RINCIAN TERKAIT BESARAN DAN JENIS ALOKASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN SEBESAR RP 53,87 MILYAR DIMAKSUD DI TAHUN 2025 LALU.

10. SECARA KHUSUS BERKENAAN DENGAN BELANJA DAERAH, KAMI MEMANDANG BAHWA BELANJA MODAL TANAH DAN BANGUNAN MERUPAKAN SALAH SATU BAGIAN PENTING DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KUNINGAN, DI MANA DENGANNYA DIHARAPKAN BISA MEMBUKA LAPANGAN KERJA BARU SERTA MENDORONG PRODUKTIVITAS KABUPATEN KUNINGAN, SEKALIGUS MENJADI ASET DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA WARGA. NAMUN DEMIKIAN DALAM PELAKSANAANNYA, KAMI HARAP AGAR SELURUH SKPD TERKAIT BENAR-BENAR MEMPEDOMANI PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA MAUPUN SYARAT UMUM DALAM SURAT PERINTAH KERJA, AGAR TERHINDAR DARI TERJADINYA KELEBIHAN PEMBAYARAN SEPERTI DI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

MOHON KIRANYA DIBERIKAN RINCIAN TERKAIT BESARAN DAN JENIS ALOKASI BELANJA MODAL TANAH DAN BANGUNAN SEPANJANG TAHUN 2025 LALU, BERIKUT PERUNTUKANNYA.

11. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MEMANDANG, BAHWA SELAIN DIPICU ADANYA *MARK-UP* TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), KONDISI GAGAL BAYAR SEJAK BEBERAPA TAHUN LALU ANTARA LAIN JUGA DIPICU OLEH PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG KURANG CERMAT, ANTARA LAIN DENGAN MEMAKSAKAN ANGGARAN UNTUK PEMBELIAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR TIMUR SELATAN (JLTS). UNTUK ITU KAMI DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DENGAN INI MENEGASKAN KEMBALI *CONCERN* KAMI AKAN HAL INI, SEKALIGUS MEMINTA PENJELASAN TERKAIT PERKEMBANGAN TERBARU SEKALIGUS RENCANA LANJUTAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASET TANAH UNTUK JLTS, TERMASUK GAMBARAN *MASTERPLAN* KE DEPANNYA, APAKAH PROYEK TERSEBUT MASIH AKAN TERUS BISA BERLANJUT ATAUKAH SEBALIKNYA, SERTA LANGKAH-LANGKAH APA SAJA YANG TELAH DITEMPUH PIHAK PEMERINTAH DAERAH DI SEPANJANG TAHUN 2025 LALU DALAM MENYIKAPINYA.

MOHON KIRANYA PEMAPARAN DAN PENJELASANNYA TERKAIT HAL INI.

12. FRAKSI KAMI SUNGGUH BERHARAP, AGAR REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2025 LALU BENAR-BENAR TELAH MENCERMINKAN *CONCERN* DARI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG MERATA, SERTA UPAYA NYATA DALAM RANGKA MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT. UNTUK ITU, MOHON DIBERI GAMBARAN PERIHAL BERAPA AKHIRNYA TOTAL REALISASI ANGGARAN YANG BISA DIALOKASIKAN DI BIDANG KESEHATAN DI TAHUN 2025 LALU, BERIKUT SUMBER-SUMBER PENGANGGARANNYA. BEGITU PULA GAMBARAN BESARAN TOTAL ANGGARAN YANG DIARAHKAN PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL YANG DIRENCANAKAN SEPANJANG TAHUN 2025 LALU, BERIKUT RINCIAN PROGRAM ATAU KEGIATAN DAN ALOKASINYA.

13. BERKENAAN DENGAN PEMBIAYAAN, TERLIHAT BAHWA ANGGARAN PEMBIAYAAN SELAMA INI DIARAHKAN GUNA MENUTUP DEFISIT YANG DISEBABKAN OLEH LEBIH BESARNYA BELANJA DAERAH DIBANDINGKAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH. PADA PRINSIPNYA, FRAKSI KAMI MENDUKUNG SEGALA BENTUK KEBIJAKAN DAN UPAYA DI LINGKUP PEMBIAYAAN DAERAH YANG DIAMBIL, SELAMA FOKUS UTAMANYA ADALAH DALAM RANGKA MENGERAKKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMULIHAN KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT. DALAM UPAYA MENGANTISIPASI DEFISIT PEMBIAYAAN DI AKHIR TAHUN 2025 LALU, UPAYA APA SAJA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEMBUKA PELUANG PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA MISALNYA DARI HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, ATAU PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA YANG SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

MOHON TANGGAPAN DAN PENJELASANNYA.

14. KHUSUS BERKENAAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TA 2025 ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BPK-RI YANG MENGUNGKAPKAN ADANYA SEJUMLAH TEMUAN, KAMI MENANGKAP BAHWA YANG PALING KRUSIAL ADALAH TERKAIT PROSES PENGANGGARAN SERTA PELAKSANAAN APBD YANG DINYATAKAN BELUM SEPENUHNYA MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH YANG TERUKUR. HAL INI TENTU SANGAT RISIKAN BAGI PROSES PENGANGGARAN APBD KE DEPANNYA. KITA TENTU TIDAK INGIN PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN YANG BERLEBIHAN AKAN TERULANG DI KEMUDIAN HARI. SEPERTI APA LANGKAH DAN ANTISIPASI DARI TIM TAPD GUNA MENGHINDARI AGAR KEJADIAN SERUPA TIDAK TERULANG LAGI DI KEMUDIAN HARI?

MOHON TANGGAPAN DAN PEMAPARAN SAUDARA BUPATI.

15. DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI WAKIL RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENGUSULKAN PROGRAM-PROGRAM YANG DISEBUT POKOK PIKIRAN (POKIR). UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 178 MENYEBUTKAN BAHWA DPRD MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN. USULAN POKIR TERMASUK DALAM FUNGSI ANGGARAN KARENA DISAMPAIKAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG). DALAM PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017, POKIR DPRD DIATUR SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD). DALAM HAL INI, ANGGOTA

DPRD WAJIB MENYAMPAIKAN POKIR YANG MENCERMINKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT. SELANJUTNYA PERMENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 2021 MEMPERKUAT POSISI POKIR DALAM MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DI MANA POKIR DISELARASKAN DENGAN KEBUTUHAN MASING-MASING DAERAH DAN DITUANGKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN. SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA BEBERAPA POKIR YANG TIDAK TERAKOMODIR DAN ATAU TIDAK TEREALISASI DALAM APBD TAHUN 2025, MOHON KIRANYA PENJELASAN DARI PIHAK PEMERINTAH DAERAH ATAS HAL INI. HAL INI PENTING, MENINGAT KAMI JUGA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB MORAL TERHADAP MASYARAKAT KONSTITUEN KAMI.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBELUM MENUTUP PANDANGAN UMUM INI, IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN DAN REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN SEBAGAI BERIKUT:

1. KAMI MEMANDANG BAHWA SESUNGGUHNYA MASIH ADA POTENSI OPTIMISME YANG DAPAT DIRAIH DI TAHUN 2026 INI MAUPUN DI TAHUN-TAHUN MENDATANG, DIBANDINGKAN APA YANG SUDAH DICAPAI TERMASUK DI SEPANJANG TAHUN 2025 LALU. KAMI BERHARAP, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUSNYA TERKAIT PENDAPATAN DAERAH BISA TERUS MENUNJUKKAN UPAYA YANG SERIUS DAN MAKSIMAL DALAM HAL MENDORONG INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI, TERMASUK PERBAIKAN DAN PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN DAERAH YANG LEBIH BAIK. KAMI MEMINTA KEPADA SELURUH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK SENANTIASA TERUS MENUMBUHKAN OPTIMISME, SEKALIGUS MENINGKATKAN LAGI KINERJANYA DARI WAKTU KE WAKTU.
2. KAMI SUNGGUH BERHARAP AGAR PEMERINTAH DAERAH BISA MENGAMBIL BERBAGAI LANGKAH TAKTIS DAN STRATEGIS YANG DIPERLUKAN GUNA MEMBANGKITKAN KEMBALI SEKTOR PEREKONOMIAN YANG TELAH MENGALAMI DAMPAK YANG CUKUP BESAR SELAMA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI. SELAIN ITU, PENINGKATAN KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA HARUS MENJADI SALAH SATU PRIORITAS GUNA MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN. BEGITU PULA HALNYA DENGAN PENINGKATAN FASILITAS BAGI KEGIATAN UMKM, PERBAIKAN SARANA PRASARANA UMUM, KEMUDAHAN PERIJINAN DUNIA USAHA, DAN UPAYA LAINNYA YANG MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.
3. KAMI SADAR BAHWASANYA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA GILIRANNYA NANTI HARUS BERBESAR HATI MENERIMA LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 INI. NAMUN TENTUNYA, KAMI AKAN TERUS MENGAWAL AGAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD DARI TAHUN KE TAHUN AKAN BENAR-BENAR SESUAI DENGAN HARAPAN BERSAMA SERTA MAMPU MEMBAWA PERUBAHAN YANG NYATA BAGI SEGENAP LAPISAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN.

4. KITA TENTU SEPAKAT BAHWA PROSES PENYUSUNAN APBD MAUPUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANNYA TERMASUK LAPORAN TAHUN 2025 LALU, TENTUNYA MASIH MEMERLUKAN PEMBAHASAN BERSAMA SECARA LEBIH MENDALAM LAGI, INTENSIF DAN KOMPREHENSIF. OLEH KARENANYA, UNTUK PERSOALAN RINCI DAN TEKNIS, AKAN KAMI SAMPAIKAN DALAM KESEMPATAN LAIN BERIKUTNYA, BAIK MELALUI FORUM FRAKSI, FORUM KOMISI, MAUPUN FORUM BADAN ANGGARAN DPRD

SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI BANGGAKAN.

DEMIKIANLAH KIRANYA PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025. TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN SERTA HIDAYAH KEPADA KITA SEMUA. AAMIIN.

**IHDINAS SIRATAL MUSTAQIM
WALLAHUL MUWAFFIQ ILLA AQWAMITH THORIQ
WASSALAMUALLAIKUM, WR. WB.**

**KUNINGAN, 03 JULI 2026
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN KUNINGAN**

Ketua



Drs. H. MOCH GOZALI, M.Si

Sekretaris



Hj. NENENG HERMAWATI, SE. MA